



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berkelanjutan melalui Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Susanti¹, Budiharjo², Dedeh Maryani³, Pandji Sukmana⁴

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, susanti.24583@gmail.com

²Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, budiharjo@dsn.moestopo.ac.id

³Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, dedeh.maryani@lecture.moestopo.ac.id

⁴Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia, pandji.sukmana@lecture.moestopo.ac.id

Corresponding Author: susanti.24583@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of policies to meet sustainable food needs, identify factors causing low food crop productivity, and formulate effective policy implementation strategies at the Food Security and Agriculture Office of South Barito Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method within the constructivism paradigm. Data collection was conducted through in-depth interviews with policy implementers and farmers, field observations, and a review of regional agricultural development policy and planning documents. Data analysis was conducted using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which are linked to the 5M agricultural production factors (man, money, method, machine, and market). Furthermore, the results of the analysis were synthesized through a SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) to formulate strategies for implementing policies to meet sustainable food needs. The results show that the implementation of policies to meet sustainable food needs in South Barito Regency has been normatively supported by adequate regulations and institutional structures, but has not been effective in increasing food crop productivity. Limited top-down policy communication, resource inequalities and limitations, weak mentoring and extension methods, low farmer motivation, and fragmented bureaucratic coordination are key weaknesses. On the other hand, the availability of potential land, national policy support, and opportunities for developing agricultural mechanization and markets represent strengths and opportunities that have not been optimally utilized. Low food crop productivity is the result of a complex interaction between internal and external policy factors.*

Keywords: *Policy Implementation, Sustainable Food Needs Fulfillment, Food Crop Productivity, Edward III, Local Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya

produktivitas tanaman pangan, serta merumuskan strategi implementasi kebijakan yang efektif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dalam paradigma konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pelaksana kebijakan dan petani, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian daerah. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang dikaitkan dengan faktor produksi pertanian 5M (*man, money, method, machine, dan market*). Selanjutnya, hasil analisis tersebut disintesis melalui analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan secara normatif telah didukung oleh regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai, namun belum efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Keterbatasan komunikasi kebijakan yang masih bersifat *top-down*, ketimpangan dan keterbatasan sumber daya, lemahnya metode pendampingan dan penyuluhan, rendahnya motivasi petani, serta fragmentasi koordinasi birokrasi menjadi faktor kelemahan utama. Di sisi lain, ketersediaan lahan potensial, dukungan kebijakan nasional, serta peluang pengembangan mekanisasi dan pasar pertanian merupakan faktor kekuatan dan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya produktivitas tanaman pangan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemenuhan Kebutuhan Pangan Berkelanjutan, Produktivitas Tanaman Pangan, Edward III, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat, stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani, serta ketahanan nasional suatu negara. Pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan telah dituangkan dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting seperti ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan, diversifikasi pangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan nasional. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan

pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, maupun infrastruktur perkotaan telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya luas lahan pertanian produktif di berbagai daerah. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya kapasitas produksi pangan nasional. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan sehingga produktivitas tanaman pangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan juga tidak terlepas dari peran petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani terhadap risiko gagal panen, fluktuasi harga, perubahan iklim, serta keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan petani. Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan tersebut, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas usahatani secara optimal dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 bertujuan menjadi arah kebijakan pembangunan pertanian nasional guna mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian. Regulasi ini juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia pertanian, penerapan inovasi teknologi, serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penetapan Peta Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tujuan Peraturan ini disusun untuk: 1. Melindungi lahan pertanian pangan agar tidak terus berkurang akibat alih fungsi lahan. 2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian guna mendukung ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Menjadi pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian LP2B di Kabupaten Barito Selatan. Pokok-Pokok Pengaturan 1. Penetapan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan dan lahan yang harus dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan, Evaluasi kawasan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. 2. Luasan LP2B dan LCP2B Peraturan ini menetapkan: 1. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 4.764,47 hektar. 2. LCP2B (Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 1.097,53 hektar. 3. Kriteria Penetapan Lahan yang ditetapkan sebagai LP2B harus: 1. Berada dalam hamparan lahan yang mendukung produktivitas. 2. Memiliki kesesuaian teknis untuk pertanian pangan. 3. Didukung infrastruktur dasar. 4. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 4. Hak dan Kewajiban Petani, petani memperoleh perlindungan dan dukungan pemerintah, namun juga berkewajiban menjaga fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B. 5. Insentif Pemerintah Daerah dapat berupa: pengembangan infrastruktur pertanian, dukungan penelitian dan pengembangan benih unggul, kemudahan akses teknologi dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penghargaan bagi petani berprestasi. 6. Pengendalian Alih Fungsi Lahan, alih fungsi LP2B dibatasi dan diawasi secara ketat. Setiap perubahan fungsi lahan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pendanaan pelaksanaan perlindungan LP2B bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Peran Serta Masyarakat, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam: perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan, pembiayaan.

Perbup Nomor 56 Tahun 2022 merupakan dasar hukum Kabupaten Barito Selatan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tetap tersedia secara berkelanjutan, menjaga ketahanan

pangan daerah, mengendalikan alih fungsi lahan, serta memberikan dukungan dan insentif kepada petani melalui penetapan LP2B seluas 4.764,47 hektar dan LCP2B seluas 1.097,53 hektar.

Dalam implementasinya, kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya produktivitas tanaman pangan di beberapa daerah akibat keterbatasan infrastruktur pertanian, rendahnya kualitas sumber daya manusia petani, keterbatasan penggunaan teknologi pertanian modern, serta perubahan iklim yang berdampak terhadap pola tanam dan hasil produksi pertanian. Selain itu, masih terjadi ketimpangan distribusi sarana produksi seperti pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta akses permodalan bagi petani kecil. Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah semakin berkurangnya generasi muda yang tertarik bekerja di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan menurunnya regenerasi petani.

Kebijakan swasembada pangan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan diversifikasi komoditas pertanian, adopsi teknologi pertanian modern, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Diversifikasi komoditas, seperti yang diungkapkan oleh Wanger et al. (2024), dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan memperbaiki pendapatan petani. Selain itu, pendekatan agroekologi yang menekankan keberagaman sistem pangan, seperti yang dijelaskan Frison (2016), juga menawarkan solusi berkelanjutan untuk menjaga kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati.

Kebijakan pemerintah yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti yang dibahas Schattman (2020), dapat mempercepat transisi menuju sistem pangan yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, penerapan rantai pasokan pangan pendek, yang diperkenalkan oleh Petruzzelli et al. (2023), memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi dampak lingkungan dari distribusi pangan. Semua kebijakan ini harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti yang diteliti oleh Starck et al. (2023), yang menunjukkan pentingnya daur ulang fosfor untuk mengurangi ketergantungan pada input eksternal dan memastikan keberlanjutan pangan di masa depan.

Studi Gustaman (2019) menunjukkan bahwa kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur pertanian yang tepat dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan di tingkat lokal. Namun, banyak kebijakan yang ada cenderung tidak cukup memperhatikan aspek teknis dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan hasil pertanian. Penelitian oleh Fadly dan Noor (2021) juga mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian dapat mendorong peningkatan hasil pertanian yang signifikan.

Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan fokus pada kebijakan lokal dan analisis implementasinya dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Barito Selatan. Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dalam memahami kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di tingkat lokal dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Barito Selatan. Dengan mengisi gap yang ada dalam literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan dan praktisi pertanian di Indonesia serta memberikan saran yang lebih terarah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi pusat pelaksanaan kebijakan kebutuhan pangan. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu

mengeksplorasi implementasi kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme karena bertujuan untuk memahami kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan dengan menggali makna dan pemahaman subjektif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti petani, dan pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan. Dengan menghargai keberagaman perspektif dan pengalaman, paradigma konstruktivisme mendukung penelitian ini untuk menggambarkan realitas yang kompleks dan kontekstual, serta memperoleh pemahaman yang kaya dan holistik tentang kebijakan swasembada pangan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi detail berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara rinci implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan. Fokus penelitian mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan strategi di lapangan, hingga evaluasi dampaknya terhadap produktivitas tanaman pangan dan keberlanjutan kebijakan di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan. Subjek meliputi pejabat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, anggota DPRD, penyuluh pertanian dan petani. Objek penelitian adalah fokus utama atau aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, anggota DPRD, penyuluh pertanian dan petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyampaikan berbagai pengalaman empiris terkait pelaksanaan kebijakan swasembada pangan di Kabupaten Barito Selatan. Pengalaman tersebut diperoleh dari aktivitas bertani yang telah dijalani selama bertahun-tahun, interaksi dengan penyuluh pertanian, serta keterlibatan dalam kegiatan kelompok tani di wilayah desa tempat tinggalnya.

Informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya program dan kebijakan swasembada pangan dari pemerintah daerah melalui penyampaian penyuluh pertanian dan media massa. Informasi mengenai tujuan dan arah kebijakan dinilai cukup mudah dipahami. Sosialisasi dan pendampingan terkait kebijakan tersebut disebutkan telah dilakukan beberapa kali dalam setahun, sehingga membantu petani memahami pesan dan maksud program yang dijalankan pemerintah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, informan menyampaikan bahwa pesan dan tujuan program pada umumnya disampaikan dengan cukup jelas. Penyuluh pertanian dinilai aktif memberikan informasi secara langsung kepada petani melalui pertemuan kelompok tani maupun kunjungan lapangan. Informan menilai bahwa komunikasi antara petani dan penyuluh selama ini berjalan baik dan tidak ditemukan kendala yang berarti dalam penyampaian informasi.

Terkait dukungan sumber daya, informan menuturkan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan sarana produksi berupa benih dan pupuk bersubsidi. Bantuan tersebut dinilai cukup membantu dalam menunjang kegiatan usahatani dan meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Namun demikian, informan mengungkapkan bahwa proses pengadaan dan

penyaluran bantuan terkadang mengalami keterlambatan dari jadwal tanam yang direncanakan petani, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan budidaya.

Informan juga mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga penyuluh di wilayah desa dinilai sudah terpenuhi, di mana satu orang penyuluh mendampingi satu desa. Kehadiran penyuluh dirasakan sangat membantu petani, baik dalam memberikan bimbingan teknis maupun dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan petani kepada pihak terkait. Meskipun demikian, informan menilai bahwa pelatihan dan sekolah lapang pertanian masih perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan penerapan teknologi pertanian modern.

Dalam konteks kondisi sumber daya dan lingkungan, informan menyampaikan bahwa kondisi lahan pertanian yang dikelola masih cukup subur, namun belum didukung oleh sistem irigasi teknis yang memadai. Pada musim hujan, lahan pertanian sering terdampak banjir, sedangkan pada musim kemarau lahan mengalami kekeringan. Kondisi tersebut memengaruhi stabilitas produksi dan menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan secara berkelanjutan.

Dari sisi sikap terhadap kebijakan, informan menuturkan bahwa dirinya sangat mendukung program swasembada pangan yang dijalankan pemerintah. Bertani dipandang sebagai bagian dari kebiasaan dan sumber penghidupan keluarga yang harus terus dijaga. Informan menyampaikan bahwa motivasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan sangat tinggi, terlebih apabila pemerintah terus memberikan pendampingan, bantuan sarana produksi, serta jaminan perlindungan terhadap risiko gagal panen.

Dari perspektif kelembagaan, informan memandang bahwa koordinasi antara kelompok tani, penyuluh, pemerintah desa, dan dinas pertanian pada umumnya berjalan cukup baik. Mekanisme penyaluran bantuan dinilai relatif jelas dan terkoordinasi, meskipun tidak semua desa atau kelompok tani menerima bantuan setiap tahun. Ke depan, informan berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dengan melibatkan petani secara lebih aktif sebagai subjek dan objek pembangunan pertanian, disertai perbaikan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, ketersediaan alat mesin pertanian, serta penguatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani dan penyuluh.

Tabel 1. Matriks Edward III dan analisis strategi kebijakan menggunakan pendekatan *strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats*.

Aspek Edward III	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
Komunikasi	Pola komunikasi dua arah antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah telah terbentuk, serta didukung peran penyuluh pertanian yang aktif dalam menyampaikan kebijakan langsung kepada petani.	Kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan belum optimal, frekuensi sosialisasi terbatas, dan pemanfaatan media komunikasi berbasis teknologi masih rendah, sehingga pemahaman kebijakan belum merata.	Perkembangan teknologi informasi dan perhatian pemerintah terhadap transformasi digital sektor pertanian membuka peluang penguatan komunikasi yang lebih cepat dan luas.	Rendahnya literasi digital petani, keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan, serta potensi distorsi informasi akibat lemahnya koordinasi lintas sektor.
Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya manusia aparatur dan penyuluh pertanian secara kuantitatif relatif memadai,	Kualitas dan Kompetensi teknis SDM belum merata, distribusi sarana prasarana belum seimbang, kondisi jalan usaha tani kurang memadai,	Dukungan Program nasional swasembada pangan dan peluang kerja sama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, dan mitra	Ketergantung an pada alokasi anggaran pemerintah pusat, fluktuasi fiskal daerah, serta meningkatnya kebutuhan sumber

	serta adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana dasar pertanian.	serta keterbatasan anggaran operasional.	Pembangunan lainnya.	daya akibat perubahan iklim dan dinamika harga input pertanian.
Disposisi / Sikap Pelaksana	Komitmen normatif aparaturnya dan orientasi pada kesejahteraan petani serta kedaulatan pangan nasional menjadi dasar sikap pelaksana kebijakan.	Pemahaman pelaksana terhadap tujuan, sasaran, dan langkah kebijakan belum seragam, serta tingkat motivasi bervariasi dan minimnya sistem insentif berbasis kinerja.	Penguatan kepemimpinan birokrasi, pengembangan budaya kerja berbasis kinerja, serta reformasi manajemen aparatur membuka peluang peningkatan disposisi pelaksana.	Kejenuhan birokrasi, tingginya beban kerja, rotasi dan mutasi pegawai, serta lemahnya pengawasan internal yang berpotensi menurunkan motivasi pelaksana.
Struktur Birokrasi	Pembagian tugas dan fungsi organisasi relatif jelas, serta ketersediaan regulasi dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan program swasembada pangan.	Prosedur birokrasi Masih cenderung berbelit, memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor, serta adanya tumpang tindih tugas dan ego sektoral antarunit kerja.	Agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola Pemerintahan membuka peluang peningkatan efisiensi dan akuntabilitas implementasi kebijakan.	Potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan resistensi birokrasi terhadap perubahan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Analisis Implementasi Kebijakan

1) Aspek Komunikasi

Dari perspektif *strengths*, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan ditopang oleh adanya mekanisme penyampaian kebijakan yang bersifat hierarkis dan terkoordinasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pola komunikasi tersebut didukung oleh koordinasi antarinstansi yang relatif berjalan dengan baik dan dipandang sebagai salah satu kunci pencapaian swasembada pangan. Kejelasan alur komunikasi formal memberikan rujukan yang relatif seragam bagi pelaksana kebijakan dalam memahami arah dan tujuan program. Namun demikian, dari sisi *weaknesses*, pemahaman kebijakan di tingkat pelaksana lapangan dan petani belum sepenuhnya merata. Perbedaan kapasitas penyuluh, intensitas sosialisasi yang belum seragam, serta keterbatasan metode komunikasi yang bersifat partisipatif menyebabkan sebagian pelaksana dan petani belum memahami kebijakan secara utuh. Kondisi ini berpotensi menghambat internalisasi kebijakan sebagai kebutuhan bersama di tingkat lokal. Di sisi lain, terdapat *opportunities* untuk memperkuat efektivitas komunikasi kebijakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital. Penggunaan media digital membuka peluang perluasan jangkauan sosialisasi kebijakan serta peningkatan intensitas komunikasi lintas wilayah. Selain itu, penguatan peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan di tingkat desa berpotensi meningkatkan pemahaman dan penerimaan kebijakan oleh petani. Sementara itu, *threats* terhadap aspek komunikasi berasal dari kompleksitas substansi kebijakan yang berpotensi menimbulkan multitafsir di tingkat implementasi. Rendahnya literasi kebijakan pada sebagian petani juga dapat menghambat pemahaman dan adopsi program secara optimal. Tanpa strategi komunikasi yang sederhana, kontekstual, dan berkelanjutan, pesan kebijakan berisiko tidak diterjemahkan secara tepat di tingkat lapangan.

2) Aspek Sumber Daya

Dari perspektif *strengths*, aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan swasembada pangan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, baik penyuluh maupun petani, yang relatif memadai. Dukungan alokasi pendanaan serta penyediaan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah turut memperkuat pelaksanaan program swasembada pangan. Kondisi ini memberikan kapasitas dasar bagi daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan produksi dan pendampingan pertanian. Namun demikian, dari sisi *weaknesses*, masih terdapat ketimpangan distribusi sumber daya manusia dan sarana prasarana antarwilayah. Keterbatasan sumber daya air serta ketersediaan lahan pertanian produktif di beberapa lokasi tertentu menjadi kendala struktural dalam peningkatan produktivitas. Ketimpangan ini menyebabkan efektivitas pemanfaatan sumber daya belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan. Di sisi lain, terdapat *opportunities* yang dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dukungan program pemerintah pusat, serta penerapan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan teknologi yang adaptif berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan secara berkelanjutan. Sementara itu, *threats* terhadap aspek sumber daya berasal dari tingginya ketergantungan sektor pertanian terhadap kondisi alam dan iklim. Risiko penurunan kualitas sumber daya juga dapat terjadi apabila pengelolaan pertanian tidak dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Tanpa strategi pengelolaan sumber daya yang adaptif, tekanan lingkungan berpotensi melemahkan keberlanjutan program swasembada pangan.

3) Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana

Dari perspektif *strengths*, disposisi pelaksana kebijakan swasembada pangan ditunjukkan oleh adanya sikap positif dan komitmen yang relatif tinggi dari aparatur pelaksana. Dukungan kuat dari pelaksana kebijakan tercermin dalam keterlibatan aktif mereka dalam berbagai program dan upaya nyata di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan dan sikap pelaksana dalam mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Namun demikian, dari sisi *weaknesses*, keterbatasan dukungan fasilitas dan sistem insentif masih menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi motivasi pelaksana, khususnya di tingkat lapangan. Beban kerja yang tinggi tanpa diiringi fasilitas pendukung yang memadai berpotensi menurunkan semangat dan efektivitas kinerja pelaksana dalam jangka panjang. Di sisi lain, terdapat peluang melalui tersedianya program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program-program tersebut berpotensi memperkuat pemahaman kebijakan, keterampilan teknis, serta rasa memiliki pelaksana terhadap kebijakan swasembada pangan. Penguatan kapasitas ini dapat menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kualitas implementasi kebijakan. Sementara itu, *threats* terhadap disposisi pelaksana muncul dari potensi kejenuhan akibat beban kerja yang tinggi dan tekanan pelaksanaan program yang berkelanjutan. Selain itu, menurunnya dukungan kebijakan dan sumber daya dapat berdampak pada penurunan komitmen pelaksana. Tanpa pengelolaan motivasi dan dukungan yang berkelanjutan, disposisi pelaksana berpotensi melemah.

4) Aspek Struktur Birokrasi

Dari perspektif *strengths*, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan swasembada pangan didukung oleh pembagian tugas dan fungsi yang relatif jelas dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ketersediaan regulasi dan *standard operating procedures* (SOP) memberikan pedoman pelaksanaan program serta menjaga konsistensi kerja aparatur dalam menjalankan kebijakan. Namun demikian, dari

sisi *weaknesses*, prosedur birokrasi dalam praktiknya masih cenderung berbelit dan berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif juga menjadi kendala dalam merespons dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan secara cepat dan adaptif. Di sisi lain, terdapat peluang yang berasal dari agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Penerapan sistem digital dalam perencanaan, pelaporan, dan koordinasi berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas implementasi kebijakan swasembada pangan. Sementara itu, *threats* terhadap struktur birokrasi berasal dari potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Apabila tidak dikelola secara adaptif, kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan dan mengurangi fleksibilitas birokrasi dalam mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan.

Analisis Faktor Produktivitas Rendah

1) Aspek Komunikasi

Pada aspek *Man*, temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian berdampak langsung pada rendahnya intensitas komunikasi dengan petani. Beban wilayah binaan yang luas menyebabkan penyuluh tidak dapat melakukan pendampingan secara rutin dan mendalam. Akibatnya, pesan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan tidak tersampaikan secara optimal kepada seluruh petani. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman dan respons petani terhadap kebijakan yang disosialisasikan. Dari perspektif *Money*, keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan komunikasi kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Anggaran yang terbatas membatasi frekuensi pertemuan, kegiatan penyuluhan, serta pengembangan media komunikasi yang lebih efektif. Akibatnya, proses komunikasi kebijakan berlangsung secara terbatas dan tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pendanaan memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas komunikasi kebijakan pertanian. Pada aspek *Method*, metode sosialisasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan *top-down* dan belum sepenuhnya partisipatif. Penyampaian informasi lebih banyak bersifat instruktif, dengan ruang dialog yang terbatas bagi petani untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Kondisi ini menyebabkan komunikasi kebijakan kurang responsif terhadap variasi kondisi lokal dan pengalaman petani. Akibatnya, kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan bersama. Selanjutnya, dari sisi *Machine*, minimnya dukungan teknologi informasi di tingkat desa turut memengaruhi efektivitas komunikasi kebijakan. Keterbatasan akses terhadap media digital dan sarana informasi modern menyebabkan penyampaian pesan kebijakan masih bergantung pada metode konvensional. Kondisi ini menghambat penyebaran informasi secara cepat dan merata. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dalam mendukung komunikasi kebijakan pertanian. Sementara itu, dalam perspektif *Market*, informasi terkait akses pasar dan harga hasil pertanian belum terintegrasi secara memadai dalam komunikasi kebijakan. Petani belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai peluang pasar dan jaminan harga yang menguntungkan. Ketidakhadiran informasi pasar ini menyebabkan petani kurang termotivasi untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi dimensi pasar dalam komunikasi kebijakan sangat penting untuk mendorong partisipasi petani.

2) Aspek Sumber Daya

Pada aspek *Man*, keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari kekurangan tenaga penyuluh dan teknisi lapangan yang mendukung kegiatan pertanian. Kondisi ini menyebabkan pendampingan teknis kepada petani tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Akibatnya, proses adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas petani

berjalan lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan dan kompetensi SDM merupakan prasyarat penting dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan. Dari perspektif *Money*, keterbatasan anggaran menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberlanjutan program pertanian. Dukungan pembiayaan yang terbatas menyebabkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Akibatnya, upaya peningkatan produktivitas berjalan secara parsial dan kurang berdampak signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang berkelanjutan dalam kebijakan pertanian. Pada aspek *Method*, mekanisme distribusi bantuan pertanian belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil petani. Penentuan jenis dan jumlah bantuan masih bersifat umum dan kurang mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah dan petani. Akibatnya, sebagian bantuan sulit dimanfaatkan secara optimal di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan metode perencanaan dan distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya, dari sisi *Machine*, keterbatasan alat dan teknologi modern menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Minimnya akses terhadap alat dan mesin pertanian menyebabkan petani masih bergantung pada metode konvensional yang kurang produktif. Selain itu, keterbatasan kemampuan pengoperasian dan perawatan alat turut memengaruhi tingkat pemanfaatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan teknologi harus diiringi dengan dukungan pendampingan yang memadai. Sementara itu, dalam perspektif pasar, keterbatasan akses pasar menyebabkan peningkatan produksi tidak selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan petani. Minimnya saluran pemasaran dan fluktuasi harga membuat petani menghadapi ketidakpastian dalam menjual hasil panen. Kondisi ini melemahkan insentif petani untuk berinvestasi dalam peningkatan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akses pasar merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan peningkatan produktivitas.

3) Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana

Pada aspek *Man*, sikap pelaksana kebijakan dan petani sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan produktivitas. Pelaksana kebijakan berperan dalam mendorong dan memfasilitasi petani, sementara petani menentukan tingkat penerimaan dan partisipasi terhadap kebijakan. Perbedaan sikap dan kepentingan antara kedua pihak berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan sikap menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Dari perspektif *Money*, dukungan finansial dan insentif ekonomi memengaruhi motivasi pelaksana dan petani. Keterbatasan insentif yang dirasakan petani menyebabkan kebijakan kurang menarik untuk diadopsi secara penuh. Di sisi lain, keterbatasan dukungan anggaran juga memengaruhi intensitas pendampingan oleh pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa aspek finansial memiliki peran strategis dalam membentuk disposisi aktor kebijakan. Pada aspek *Method*, kebutuhan akan pendekatan pendampingan yang lebih partisipatif menjadi semakin penting. Pendekatan yang masih bersifat instruktif belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif petani. Akibatnya, kebijakan sering dipersepsikan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Kondisi ini menghambat terbentuknya komitmen bersama dalam peningkatan produktivitas. Selanjutnya, dari sisi *Machine*, penerimaan teknologi baru oleh petani sangat dipengaruhi oleh kesesuaian teknologi dengan kondisi lokal. Keterbatasan pemahaman dan pengalaman dalam menggunakan teknologi baru meningkatkan persepsi risiko usaha tani. Dalam kondisi ini, teknologi belum sepenuhnya menjadi pendorong peningkatan produktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan dalam proses adopsi teknologi. Sementara itu, dalam perspektif *Market*, motivasi petani untuk meningkatkan produksi sangat dipengaruhi oleh kondisi harga dan akses pasar. Ketika harga stabil dan akses pasar

terbuka, petani lebih terdorong untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketidakpastian pasar memperkuat sikap kehati-hatian petani. Kondisi ini menegaskan bahwa kepastian pasar merupakan faktor kunci dalam membentuk disposisi petani.

4) Aspek Struktur Birokrasi

Pada aspek *Man*, kapasitas aparatur birokrasi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pertanian. Keterbatasan kompetensi dan beban kerja aparatur menyebabkan pelaksanaan program tidak selalu berjalan optimal. Akibatnya, koordinasi dan pengambilan keputusan di tingkat lapangan sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting dalam struktur birokrasi. Dari perspektif *Money*, dukungan anggaran memengaruhi efisiensi operasional birokrasi dalam menjalankan program pertanian. Keterbatasan dana operasional membatasi ruang gerak aparatur dalam merespons kebutuhan lapangan secara cepat. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan menjadi kurang fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembiayaan berpengaruh langsung terhadap kinerja birokrasi. Pada aspek *Method*, prosedur kerja yang masih kaku menjadi kendala dalam adaptasi kebijakan terhadap dinamika lapangan. Penekanan pada kepatuhan prosedural sering kali mengurangi ruang inovasi dan inisiatif aparatur. Akibatnya, kebijakan dijalankan secara rutin tanpa penyesuaian yang signifikan. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan dalam meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dari sisi *Machine*, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital dalam birokrasi belum optimal. Keterbatasan integrasi data dan penggunaan sistem informasi menyebabkan proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kurang berbasis data. Akibatnya, pengambilan keputusan belum sepenuhnya akurat dan responsif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem informasi pertanian. Sementara itu, dalam perspektif *Market*, birokrasi yang lamban dapat menghambat respons cepat terhadap dinamika pasar pertanian. Keterlambatan dalam merespons fluktuasi harga dan permasalahan pemasaran berdampak langsung pada petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi perlu lebih adaptif agar kebijakan pertanian mampu merespons perubahan pasar secara efektif.

Analisis Strategi Kebijakan

1) Aspek Komunikasi

a) Faktor Internal

Dari perspektif faktor internal, aspek komunikasi menunjukkan adanya *strengths* yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan. Pola komunikasi yang bersifat dua arah antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah memberikan ruang bagi pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan secara berjenjang. Keberadaan penyuluh pertanian sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat lapangan menjadi elemen kunci dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada petani. Mekanisme sosialisasi melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pertemuan kelompok tani menjadi dasar tersampainya kebijakan secara langsung kepada sasaran program. Namun demikian, *strengths* internal tersebut masih dihadapkan pada sejumlah *weaknesses* yang membatasi efektivitas strategi komunikasi. Kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan yang diterima oleh pelaksana lapangan dan petani belum sepenuhnya optimal. Perbedaan interpretasi kebijakan antar pelaksana, keterbatasan frekuensi sosialisasi, serta minimnya pemanfaatan media komunikasi berbasis teknologi menyebabkan informasi kebijakan belum dipahami secara merata. Kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan yang luas dan sebagian wilayahnya sulit dijangkau turut

memperkuat tantangan komunikasi, sehingga penyampaian pesan kebijakan berpotensi tidak merata di seluruh wilayah sasaran.

b) Faktor Eksternal

Dari perspektif faktor eksternal, aspek komunikasi dihadapkan pada sejumlah *opportunities* yang berpotensi memperkuat efektivitas penyampaian kebijakan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang pemanfaatan digitalisasi penyuluhan pertanian, penggunaan media sosial, serta platform informasi berbasis daring untuk memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan. Selain itu, meningkatnya perhatian pemerintah terhadap transformasi digital di sektor pertanian memberikan ruang inovasi dalam merancang strategi komunikasi kebijakan yang lebih adaptif, cepat, dan mudah diakses oleh petani. Di sisi lain, faktor eksternal juga menghadirkan *threats* yang dapat menghambat efektivitas komunikasi kebijakan. Rendahnya literasi digital sebagian petani, keterbatasan infrastruktur jaringan komunikasi di wilayah pedesaan, serta potensi distorsi informasi akibat lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama. Apabila *threats* tersebut tidak diantisipasi melalui penguatan koordinasi dan strategi komunikasi yang terencana, maka pemahaman kebijakan di tingkat petani berisiko rendah dan berdampak pada menurunnya efektivitas implementasi program peningkatan produktivitas tanaman pangan.

2) Aspek Sumber Daya

a) Faktor Internal

Dari perspektif faktor internal, aspek sumber daya menunjukkan adanya *strengths* yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia aparatur dan penyuluh pertanian yang secara kuantitas dinilai cukup menjadi modal internal dalam mendukung kebijakan swasembada pangan di Kabupaten Barito Selatan. Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN, serta keberadaan sarana dan prasarana pertanian dasar, memberikan fondasi awal bagi upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan. Namun demikian, *strengths* internal tersebut masih dihadapkan pada sejumlah *weaknesses* struktural yang membatasi efektivitas strategi sumber daya. Kualitas dan kompetensi teknis sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi pertanian modern, masih belum optimal. Selain itu, distribusi sarana dan prasarana pertanian yang belum merata, kondisi jalan usaha tani yang kurang memadai, serta keterbatasan anggaran operasional turut menghambat pemanfaatan sumber daya secara maksimal dan berkelanjutan.

b) Faktor Eksternal

Dari perspektif faktor eksternal, terdapat *opportunities* yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat strategi sumber daya. Dukungan program nasional swasembada pangan, potensi kerja sama dengan pihak swasta, lembaga keuangan, serta mitra pembangunan lainnya membuka ruang bagi penguatan sumber daya melalui pendanaan alternatif, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi pertanian. Peluang ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan tidak semata bergantung pada anggaran daerah. Di sisi lain, faktor eksternal juga menghadirkan *threats* yang perlu diantisipasi secara strategis. Ketergantungan pada alokasi anggaran pemerintah pusat, fluktuasi fiskal daerah, serta meningkatnya kebutuhan sumber daya akibat tantangan perubahan iklim dan dinamika harga input pertanian berpotensi melemahkan keberlanjutan implementasi

kebijakan. Apabila *threats* ini tidak dikelola secara adaptif, maka stabilitas penyediaan sumber daya pertanian berisiko terganggu dalam jangka panjang.

3) Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana

a) Faktor Internal

Dari perspektif faktor internal, aspek disposisi menunjukkan adanya *strengths* yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan. Komitmen normatif aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung kebijakan swasembada pangan berkelanjutan menjadi modal penting dalam pelaksanaan program. Orientasi pada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan petani, serta kedaulatan pangan nasional tercermin dalam sikap pelaksana kebijakan yang berupaya menjalankan program secara konsisten meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Namun demikian, pada dimensi internal juga ditemukan *weaknesses* yang memengaruhi efektivitas disposisi pelaksana. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan, sasaran, dan langkah-langkah kebijakan belum sepenuhnya seragam. Perbedaan interpretasi kebijakan, variasi tingkat motivasi, serta minimnya sistem insentif berbasis kinerja berpotensi menurunkan konsistensi dan kualitas implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

b) Faktor Eksternal

Dari perspektif faktor eksternal, terdapat *opportunities* yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat disposisi pelaksana. Penguatan kepemimpinan birokrasi, pengembangan budaya kerja berbasis kinerja, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang lebih objektif membuka ruang bagi peningkatan profesionalisme aparatur. Reformasi manajemen aparatur sipil negara berpotensi memperkuat komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Di sisi lain, faktor eksternal juga menghadirkan *threats* yang dapat memengaruhi keberlanjutan disposisi pelaksana. Kejenuhan birokrasi, tingginya beban kerja, rotasi dan mutasi pegawai, serta lemahnya pengawasan internal berpotensi menurunkan motivasi aparatur. Apabila kondisi ini tidak dikelola secara sistematis, maka efektivitas implementasi kebijakan peningkatan produktivitas tanaman pangan berisiko melemah.

4) Aspek Struktur Birokrasi

a) Faktor Internal

Dari perspektif faktor internal, aspek struktur birokrasi menunjukkan adanya *strengths* yang relatif mendukung pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas dan fungsi yang relatif jelas dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, serta ketersediaan regulasi dan standard operating procedures (SOP), memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan program swasembada pangan. Kejelasan kewenangan dan pola koordinasi antarbidang menjadi dasar bagi pelaksanaan program secara terstruktur dan terencana. Namun demikian, pada dimensi internal juga ditemukan *weaknesses* struktural yang membatasi efektivitas birokrasi. Prosedur birokrasi yang masih cenderung berbelit dalam praktiknya memperlambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan. Selain itu, potensi tumpang tindih tugas dan ego sektoral antarunit kerja menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

b) Faktor Eksternal

Dari perspektif faktor eksternal, terdapat *opportunities* yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memperkuat struktur birokrasi. Agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan membuka peluang penyederhanaan prosedur, integrasi sistem informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Apabila peluang ini dimanfaatkan secara terencana dan konsisten, maka kinerja birokrasi sektor pertanian berpotensi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, faktor eksternal juga menghadirkan *threats* yang perlu diantisipasi. Potensi tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta resistensi birokrasi terhadap perubahan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan merupakan proses kebijakan yang secara normatif telah dirancang dengan cukup komprehensif, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kontekstual yang memengaruhi capaian produktivitas tanaman pangan.
2. Pada dimensi komunikasi, kebijakan swasembada pangan berkelanjutan telah disosialisasikan melalui mekanisme formal dan jalur birokrasi yang jelas, dengan penyuluh pertanian berperan sebagai aktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan petani, namun komunikasi kebijakan tersebut masih cenderung bersifat top-down dan prosedural.
3. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pertanian secara umum telah ada, namun belum dikelola secara optimal dan berkeadilan.
4. Dari sisi disposisi, aparatur pada umumnya menunjukkan kesediaan dan kepatuhan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun komitmen tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku petani.
5. Pada dimensi struktur birokrasi, kejelasan tugas dan fungsi organisasi telah terbentuk secara formal, namun koordinasi lintas bidang dan lintas program masih belum terintegrasi secara optimal.
6. Dengan demikian, rendahnya produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Barito Selatan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas tanaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan mengakibatkan rendah?

1. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya produktivitas tanaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sumber daya, sarana prasarana, kondisi wilayah, maupun implementasi kebijakan pertanian. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan pertanian sesuai tata ruang wilayah, sehingga pengembangan kawasan pertanian belum terintegrasi secara spesifik dan terpadu, kondisi lahan yang sebagian merupakan lahan marginal, seperti lahan gambut, lahan kritis, dan lahan terlantar, menyebabkan produktivitas tanaman pangan sulit meningkat secara maksimal. Faktor alam juga menjadi tantangan tersendiri, seperti banjir, kondisi rawa, serta kerusakan jaringan irigasi rawa yang masih banyak ditemukan pada berbagai daerah irigasi di Kabupaten Barito Selatan. Kerusakan saluran tersier, pintu air, dan belum optimalnya fungsi jaringan irigasi

menyebabkan distribusi air pertanian belum berjalan efektif sehingga mempengaruhi hasil produksi tanaman pangan.

2. Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) masih belum merata antar kecamatan. Beberapa wilayah masih memiliki jumlah alsintan yang sangat terbatas dan ditemukan pula alsintan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat akibat lemahnya sistem pemeliharaan dan minimnya dukungan teknis pasca distribusi.
3. Strategi implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan yang efektif diterapkan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan. Keberhasilan implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program dan bantuan pemerintah, tetapi sangat bergantung pada sinergi antaraktor, efektivitas tata kelola kebijakan, pemerataan sumber daya pertanian, serta keberlanjutan dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pertanian yang produktif, mandiri, dan berdaya saing guna mewujudkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu memperkuat pola komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada kebutuhan petani. Penyuluhan pertanian tidak hanya difokuskan pada penyampaian program secara administratif, tetapi juga diarahkan pada peningkatan pemahaman, kesadaran, serta perubahan perilaku petani agar lebih adaptif terhadap inovasi dan teknologi pertanian modern.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan sumber daya pertanian, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan anggaran. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan petani perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, pendampingan intensif, serta penguatan kompetensi pengelolaan usaha tani berbasis produktivitas dan keberlanjutan.
3. Perlu dilakukan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi rawa, saluran tersier, dan pintu air yang mengalami kerusakan, agar distribusi air pertanian dapat berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan intensitas tanam. Selain itu, pengembangan infrastruktur pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah lahan rawa dan lahan marginal di Kabupaten Barito Selatan.
4. Distribusi alat dan mesin pertanian (*alsintan*) perlu dilakukan secara lebih merata dan berbasis kebutuhan wilayah, disertai dengan sistem pemeliharaan, pengawasan, dan dukungan teknis pasca distribusi yang jelas. Dengan demikian, bantuan (*alsintan*) tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi pertanian masyarakat.
5. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas bidang, lintas program, dan lintas sektor dalam implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan agar seluruh program pertanian dapat berjalan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada hasil. Integrasi kebijakan antara aspek produksi, distribusi, pemasaran, dan pemberdayaan petani menjadi penting untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.
6. Dalam rangka meningkatkan motivasi petani, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada

peningkatan kesejahteraan petani melalui kepastian harga hasil panen, akses pasar, dukungan permodalan, serta penguatan kelembagaan petani. Dengan adanya jaminan ekonomi yang lebih baik, petani diharapkan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan.

7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait implementasi kebijakan swasembada pangan berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti analisis kelembagaan, tata kelola pertanian berbasis wilayah, ataupun pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek keberlanjutan pasar, digitalisasi pertanian, dan ketahanan pangan daerah secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ahmad, N., & Khan, A. (2021). Food Self-Sufficiency and Food Security: A Holistic Approach. *Journal of Business and Economic Options*, 4(2), 35–40.
- Ali, M. M. R., Hazman, M., Khafagy, M. H., & Thabet, M. (2023). Intelligent food security model to predict the self-sufficiency status of wheat based on supervised classification algorithms. *International Journal of Advanced Computer Research*, 13(65), 1–18. <https://doi.org/10.19101/ijacr.2023.1362009>
- Arista, N. I. D., Alifia, A. D., Mubarak, H., Arta, I. M. S. D., Rizva, D. N., & Wicaksono, A. I. (2023). Availability and potential for expansion of agricultural land in Indonesia. *Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.61511/jssew.v1i1.2023.242>
- Ariyanti, S. D., Nabila, U., Rahmawati, L., Syariah, M. E., Ampel, S., Pascasarjana, D., Syariah, E., & Surabaya, I. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Produksi Beras Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Fulfilling National Rice Production Needs in Improving Public Welfare According to an Islamic Economic Perspective. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 82–93. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9121>
- B. P., Widiastuti, M. L., Rumanti, I. A., Suwarno, W. B., & Nugraha, Y. (2023). Advances in the development of rice varieties with better nutritional quality in Indonesia. *Journal of Agriculture and Food Research*, 12(April), 100602. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100602>
- Barman, A., Das, R., & De, P. K. (2021). Impact of COVID-19 in food supply chain: Disruptions and recovery strategy. *Current Research in Behavioral Sciences*, 2(November), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100017>
- Beltran-Pea, A., Rosa, L., & D'Odorico, P. (2020). Global food self-sufficiency in the 21st century under sustainable intensification of agriculture. *Environmental Research Letters*, 15(9). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab9388>
- Béné, C., D'Hôtel, E. M., Pelloquin, R., Badaoui, O., Garba, F., & Sankima, J. W. (2024). Resilience and collapse of local food systems in conflict affected areas; reflections from Burkina Faso. *World Development*, 176 (December 2023), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106521>
- Brankov, T., Matkovski, B., Jeremić, M., & Đurić, I. (2021). Food self-sufficiency of the see countries: is the region prepared for a future crisis? *Sustainability (Switzerland)*, 13(16), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13168747>
- Brink, B. ten, Giesen, P., & Knoope, P. (2023). Future responses to environment-related food self-insufficiency, from local to global. *Regional Environmental Change*, 23(3), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s10113-023-02069-4>
- Cateia, J. V., Lobo, M. V., Bittencourt, T. S. C., & Savard, L. (2024). The impacts of agricultural productivity on structural transformation, and poverty alleviation in Africa:

- evidence from Guinea-Bissau. *Journal of Productivity Analysis*, 61(1), 305–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11123-023-00703-1>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (5th ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Enriquez, J. P. (2020). Food Self-Sufficiency: Opportunities and Challenges for the Current Food System. *Biomedical Journal of Scientific & Technical Research*, 31(2), 23984–23989. <https://doi.org/10.26717/bjstr.2020.31.005061>
- Fleming, C. A. K., Sharma, D., Brunacci, K., Chandra, S., Lala, G., Munn, L., & Third, A. (2023). Fix my food: An urgent call to action from adolescents on how they experience and want to see change in their food systems. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 36(6), 2295–2309. <https://doi.org/10.1111/jhn.13228>
- Gren, I. M., Jonasson, L., Andersson, H., & Knutsson, R. (2024). Economic impact and food security effects of trade disruptions in agricultural products for Sweden. *Agriculture and Food Security*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40066-024-00483-3>
- Gulyas, B. Z., & Edmondson, J. L. (2024). The contribution of household fruit and vegetable growing to fruit and vegetable self-sufficiency and consumption. *Plants People Planet*, 6(1), 162–173. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10413>
- Gumelinsi, P. M. P., Hadi, F. R., & Rifai, A. (2024). Analisis Kebijakan Pengembangan Daya Saing Padi Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agri Sains*, 8(1), 158–166.
- H. (2022). Regional self-sufficiency: A multi-dimensional analysis relating agricultural production and consumption in the European Union. *Sustainable Production and Consumption*, 34, 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.08.014>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Indradi, S. S. (2006). *Dasar Dasar dan Teori Administrasi Publik* (p. 163).
- Ito, J., & Li, X. (2023). Interplay between China's grain self-sufficiency policy shifts and interregional, intertemporal productivity differences. *Food Policy*, 117(April), 102446. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102446>
- Kementerian Pertanian. (2025). Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Prioritas
- Kementerian Pertanian. (2025). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan.
- Maqbool, M. E., Farhan, A., & Qamar, M. A. (2024). Global impact of COVID-19 on food safety and environmental sustainability: Pathways to face the pandemic crisis. *Heliyon*, 10(15), e35154. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35154>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Niu, Y., Xie, G., Xiao, Y., Liu, J., Zou, H., Qin, K., Wang, Y., & Huang, M. (2022). The story of grain self-sufficiency: China's food security and food for thought. *Food and Energy Security*, 11(1), 1–19. <https://doi.org/10.1002/fes3.344>
- Nkgudi, T. M., Maake, M. M. S., & Masekoameng, M. R. (2022). The Ilima-Letsema programme's contribution to poverty alleviation in Gauteng Province, South Africa. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6(1), 1–28. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.975127>
- Nontu, Y., Mdoda, L., Dumisa, B. M., Mujuru, N. M., Ndwandwe, N., Gidi, L. S., & Xaba, M. (2024). Empowering Rural Food Security in the Eastern Cape Province: Exploring the Role and Determinants of Family Food Gardens. *Sustainability (Switzerland)*, 16(16), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su16166780>

- Nwankwo, C. U., Ikehi, M. E., Ejiofor, T. E., & Ifeanyieze, F. O. (2024). Successive national agricultural policies/ programmes, growth of gross domestic product (GDP) and expansion of agribusinesses in Nigeria. *PLoS ONE*, 19(2 February), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291999>
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). Collaborative Governance : A new era of public policy in Australia? In *Collaborative Governance : A new era of public policy in Australia?* ANU E Press. https://doi.org/10.26530/oapen_458884
- Opoku, A., Duff, A., Yahia, M. W., & Ekung, S. (2024). Utilisation of green urban space for food sufficiency and the realisation of the sustainable development goals – UK stakeholders perspective. *Geography and Sustainability*, 5(1), 13–18. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2023.10.001>
- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. (2022). Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.
- Qu, B., Xiao, Z., Upadhyay, A., & Luo, Y. (2024). Perspectives on sustainable food production system: Characteristics and green technologies. *Journal of Agriculture and Food Research*, 15(December 2023), 100988. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.100988>
- Rozi, F., Santoso, A. B., Mahendri, I. G. A. P., Hutapea, R. T. P., Wamaer, D., Siagian, V., Elisabeth, D. A. A., Sugiono, S., Handoko, H., Subagio, H., & Syam, A. (2023). Indonesian market demand patterns for food commodity sources of carbohydrates in facing the global food crisis. *Heliyon*, 9(6), e16809. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16809>
- Silva, J. V., Jaleta, M., Tesfaye, K., Abeyo, B., Devkota, M., Frija, A., Habarurema, I., Tembo, B., Bahri, H., Mosad, A., Blasch, G., Sonder, K., Snapp, S., & Baudron, F. (2023). Pathways to wheat self-sufficiency in Africa. *Global Food Security*, 37(September 2022), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100684>
- Soltani, A., Alimagham, S. M., Nehbandani, A., Torabi, B., Zeinali, E., Zand, E., Vadez, V., van Loon, M. P., & van Ittersum, M. K. (2020). Future food self-sufficiency in Iran: A model-based analysis. *Global Food Security*, 24(December 2019), 100351. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100351>
- Somantri, A. S., Luna, P., Widi, I., & Waryanto, B. (2020). Analisis Sistem Dinamik Untuk Evaluasi Pencapaian Swasembada Beras Melalui Program Upaya Khusus. *Informatika Pertanian*, 29(2), 95–110.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tchoukouang, R. D., Onyeaka, H., & Nkoutchou, H. (2024). Assessing the vulnerability of food supply chains to climate change-induced disruptions. *Science of the Total Environment*, 920(February), 171047. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171047>
- Tranggono, Akbar, R. M. J. I., Putri, V. Z. R., Arifah, N., Wikarsa, O. G., & Ramadhan, R. J. (2023). Krisis Ketahanan Pangan Penyebab Ketergantungan Impor Tanaman Pangan di Indonesia. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, 1(2), 73–81. <https://journal.csspublishing.com/index.php/azzahra/article/view/56/23>
- Ullah, I., Dagar, V., Tanin, T. I., Rehman, A., & Zeeshan, M. (2024). Agricultural productivity and rural poverty in China: The impact of land reforms. *Journal of Cleaner Production*, 475(October), 143723. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143723>
- Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In *Bumi Akasara, Jakarta* (p. 262).
- Wassénus, E., Porkka, M., Nyström, M., & Søgaard Jørgensen, P. (2023). A global analysis of potential self-sufficiency and diversity displays diverse supply risks. *Global Food Security*, 37(January). <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100673>

- Widodo, J. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (p. 186).
- Yudistira, F. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik*. 2, 1–32.